

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA
TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian sasaran pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan terkait yang perlu dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 memfokuskan pada rencana kegiatan strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Dengan disusunnya RKT 2019 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Suwandi, M.Si

NIP. 19670323 199203 1003

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan hortikultura Indonesia tahun 2015-2019 difokuskan pada penyelesaian masalah strategis, diantaranya: 1) Pengendalian inflasi dan substitusi impor; 2) Pembangunan hortikultura ramah lingkungan yang mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam untuk meningkatkan daya saing; 3) Mengantisipasi perubahan gaya hidup ; 4) Penguasaan pangsa pasar domestik dan ekspor dengan meningkatkan akselerasi pengutuhan kawasan-kawasan hortikultura dan memperkuat jejaring antar pelaku usaha hortikultura; 5) Pemanfaatan hasil kreatifitas, inovatif dan kearifan lokal dalam mengoptimalkan sistem budidaya hortikultura ramah lingkungan, dan penerapan teknologi pascapanen; 6) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura nusantara berbasis kawasan dengan fokus komoditas dan kegiatan dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 7) meningkatkan citra apresiasi dan cinta akan hortikultura Indonesia serta perubahan pola pikir masyarakat Indonesia untuk mencintai produk hortikultura nusantara.

Kebijakan utama Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2019 diarahkan kepada: 1) pengembangan kawasan komoditas prioritas, yaitu aneka cabai dan bawang merah untuk menjaga pasokan aman dan mencukupi kebutuhan konsumsi terutama dalam negeri, 2) upaya swasembada bawang putih, 3) pengembangan jeruk, pisang, mangga, manggis, dan buah lainnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor serta substitusi impor, 4) peningkatan daya saing dan nilai tambah hortikultura, penyederhanaan rantai pasok melalui pasar lelang serta membangun kawasan, skala ekonomi dan pengembangan hilirisasi produk hortikultura.

Komoditas cabai dan bawang merah telah secara nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional. Komoditas tersebut menjadi komoditas strategis yang mendapat perhatian bagi pemerintah dalam usahanya melakukan stabilisasi harga melalui stabilisasi produksi dan perbaikan mutu produk. Perhatian terhadap cabai dan bawang merah tetap dipertahankan dengan mendorong stabilitas pasokan di luar Pulau Jawa dan mendorong hilirisasi komoditas tersebut khususnya di Pulau Jawa dan nasional pada umumnya.

Pengembangan sub sektor hortikultura juga diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan nasional dan komoditas spesifik lokasi agar meningkatkan skala usaha pengembangan hortikultura seperti jeruk, mangga, manggis, nenas, salak dan buah lainnya serta tanaman florikultura. Selain itu, jumlah buah impor yang berdatangan ke pasar lokal seperti jeruk membuat menurunnya pendapatan petani lokal. Pembangunan hortikultura bertujuan untuk mendorong tumbuh kembangnya agribisnis hortikultura yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, ramah bagi lingkungan, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, memperkuat

perekonomian wilayah untuk mendukung pertumbuhan pendapatan nasional. Pengembangan komoditas buah diprioritaskan untuk dialokasikan pada daerah perbatasan karena wilayah perbatasan memiliki peran strategis dari sisi geopolitik nasional. Nilai ekonomi di wilayah perbatasan memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional meskipun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Kompleksitas kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan dituntut menjadi lebih profesional searah dengan visi dan misi kementerian/lembaga. Kebijakan penganggaran diarahkan pada penganggaran dengan pendekatan program. Konsekuensi dari penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan penganggaran dengan pendekatan program tersebut dilakukan penyempurnaan secara bertahap, diantaranya melalui kebijakan penggunaan belanja bantuan pemerintah dan kejelasan bahasa penganggaran. Penerapan sistem penganggaran terpadu diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang terkait langsung dengan Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.2. **Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 adalah memberi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga capaian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

1.3. **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian tahun 2019 adalah tersusunnya RKT Ditjen Hortikultura sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura.

1.4. **Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
- 2) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Renstra Kementerian Pertanian Revisi 2015-2019.
- 6) Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi 2015-2019.
- 7) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pertanian adalah :

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah :

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
- 2) Meningkatkan Nilai tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

2.2. Tujuan dan Target

Selaras dengan hal tersebut maka Tujuan Pembangunan Hortikultura adalah **“Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura”** dengan indikator dan target tujuan sebagai berikut ;

TUJUAN	Indikator tujuan	Target 2019
Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura	PDB hortikultura per jumlah tenaga kerja hortikultura	Rp. 36 juta

Sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi :

- 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura
- 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura
- 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan
- 4) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura
- 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

2.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi pembangunan hortikultura 2015-2019 fokus pada usaha pengembangan kawasan, pengembangan sistem perbenihan, pengembangan sistem pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura, pengembangan sistem

perlindungan, serta tata kelola manajemen. Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1). Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura

- a) Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta registrasi kebun/lahan usaha.
- b) Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju kemandirian usaha hortikultura.
- c) Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan pola produksi dan penanganan pasca panen.

2). Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

- a) Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan hortikultura
- b) Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk kemandirian benih dalam negeri
- c) Fasilitasi sarana prasarana perbenihan untuk menghasilkan benih bermutu
- d) Pemasarakatan dan promosi penggunaan benih bermutu

3). Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

- a) Perlindungan Tanaman Berbasis Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
- b) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BTPPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT dan PPAH)
- c) Peningkatan Pengendalian OPT Hortikultura Penanganan Dampak Perubahan Iklim.

4). Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura

- a) Fasilitasi Gudang/Bangsas pascapanen
- b) Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen
- c) Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan
- d) Jumlah Cold Storage Hortikultura
- e) Fasilitasi Pemasaran Hortikultura
- f) Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

5). Tata Kelola Manajemen

- a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja
- b) Peningkatan pengendalian internal
- c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi
- d) Peningkatan pengelolaan aset
- e) Peningkatan aspek kehumasan
- f) Pengelolaan regulasi hortikultura
- g) Pengelolaan Sumberdaya manusia hortikultura

III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program Pembangunan Hortikultura

Permentan No 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

Dengan demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai program yaitu:

“Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”

3.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan cerminan dari tugas unit Eselon II yang ada di Direktorat Jenderal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan output kegiatan meliputi: kawasan jeruk, kawasan buah lainnya, kawasan florikultura, fasilitasi teknis dukungan produksi Buah dan Florikultura, Kawasan Buah di wilayah perbatasan, kawasan mangga, kawasan manggis, kawasan pisang, GAP Buah dan Florikultura, Registrasi Kebun Buah dan Registrasi Lahan Usaha Florikultura.
2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan output kegiatan meliputi: kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan, fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat, serta GAP sayuran dan tanaman obat.
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: Pengembangan Mutu dan Standarisasi, Fasilitas pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, GHP Hortikultura, Pemasaran dan Produk Hortikultura, Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Fasilitas pascapanen dan pengolahan Hortikultura Lainnya.
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: produksi benih bawang merah, benih buah lainnya, benih jeruk, benih sayuran lainnya, benih cabai, sarana prasarana benih hortikultura, sertifikasi benih hortikultura dan Fasilitas Teknis Dukungan Perbenihan Hortikultura.
5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan dengan output kegiatan meliputi: gerakan pengendalian OPT Cabai dan Bawang merah, Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya, Penerapan PHT (PPHT), Desa Pertanian Organik, Fasilitas teknis dukungan perlindungan hortikultura dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim.
6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: 1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; dan 3) layanan perkantoran, terdiri dari administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan, pembayaran gaji dan tunjangan serta pemeliharaan kantor.

3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk mempertajam pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dapat diurai sebagai berikut:

1. Langkah Operasional Pengembangan Kawasan
 - Peningkatan produksi hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi
 - Pengembangan lahan baru untuk pengembangan kawasan cabe, bawang merah, dan sayuran lain (bawang putih)
 - Pengembangan kawasan hortikultura untuk di daerah perbatasan
 - Perbaikan produksi pola tanam cabe dan bawang merah
 - Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
 - Penerapan GAP
 - Registrasi Lahan Usaha
 - Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
 - Penyediaan teknologi cabai dan bawang merah
2. Langkah Operasional Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura
 - Fasilitasi sistem distribusi penyimpanan dan rantai dingin
 - Penyediaan dan pembinaan bangsal pascapanen
 - Penyediaan sarana prasarana pascapanen
 - Fasilitasi penerapan jaminan mutu
 - Fasilitasi sarana prasarana pengolahan
 - Fasilitasi pemasaran hortikultura
3. Langkah Operasional Pengembangan Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura
 - Penyediaan benih sumber dalam bentuk biji *True Shallot Seed* (TSS) dan umbi khusus untuk bawang merah.
 - Perbaikan infrastruktur perbenihan pada penangkar.
 - Sertifikasi benih bermutu
4. Langkah Operasional Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman
 - Gerakan pengendalian OPT secara ramah lingkungan
 - Fasilitasi model penerapan pengendalian OPT yang ramah lingkungan
 - Pengamatan lapang terhadap serangan OPT dan DPI
5. Langkah Operasional Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Usaha Hortikultura
 - Penguatan peran kapasitas lembaga pengelola
 - Penguatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola
 - Penerapan manajemen pembangunan berbasis *Clean and Good Governance*
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 penjabaran rencana kinerja dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi Tahun 2015-2019. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Disamping itu, kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan program kegiatan hortikultura melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Program		Indikator Kinerja Strategis		Satuan	Target
SP01	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	3,29
		2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	%	10.65
SP02	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3	Produksi cabai	Ton	2.295.481
		4	Produksi bawang merah	Ton	1.639.724
SP03	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	%	90
SP04	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	5
SP05	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	83,00
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	74,00